

ROHANI

Menjadi Semakin Insani



Belum termasuk ongkos kirim.

Berjalan Bersama Mereka yang Lemah

Hospitable Language di Indonesia Timur | Jangan Ada yang Lapar di Rumah Kita!
Gereja sebagai "Kesadaran Kontra" (*Contra-Consciousness*) | Panggilan untuk Perubahan

ROHANI



PENANGGUNG JAWAB
G.P. Sindhunata, SJ

PEMIMPIN REDAKSI
A. Bagus Laksana, SJ

KOORDINATOR
Yulius Suroso, SJ

REDAKSI
M. Dam Febrianto, SJ
Harry Kristanto, SJ
Antonius Siwi Dharma Jati, SJ
Angelo Tiro Daenuwy, SJ
Antonius Bagus Prasetya A.N., SJ

ARTISITIK
Willy Putranta
Slamet Riyadi

KUANGAN
Ani Ratna Sari

PROMOSI
Francisca Triharyanti

IKLAN
Slamet Riyadi

ADMINISTRASI, SIRKULASI, dan DISTRIBUSI
Anang Pramuriyanto
Maria Dwi Jayanti

HUBUNGI KAMI!

✉ Redaksi:
rohanimajalah@gmail.com
Administrasi/distribusi:
rohani.adisi@gmail.com
✉ Jl. Pringgokusuman
No. 35, Yogyakarta 55272
✉ 0274.546811, 085729548877
✉ 0274.546811

DAFTAR ISI

KATA REDAKSI

1 Persahabatan

A. Bagus Laksana, SJ

SAJIAN UTAMA

5 Berjalan Bersama Mereka yang Lemah

F. Pieter Dolle, SJ

10 *Hospitable Language* di Indonesia Timur

Mateus Mali, CSSR

15 Merajut Jejaring Persaudaraan

Andreas B. Atawolo, OFM

OLEH-OLEH REFLEKSI

20 Panggilan untuk Perubahan

Adrianus Suyadi, SJ

BAGI RASA

26 Semangat Magis dalam Studi

Aaron Lee Chee Khong, SJ

LABDA YANG HIDUP

31 Tidak Jujur Tapi Cerdik

Bernadus Dirgaprimawan, SJ

KAU! BIARA

36 Hidup Membiara dan Hak Asasi Manusia

Paul Suparno, SJ

FOTO COVER:

www.omsc.org/artist-varghese

CARA BERLANGGANAN:

Hubungi agen setempat atau langsung ke bagian Distribusi Majalah ROHANI. Harga eceran: Jawa @ Rp 20.000,00 langganan 12 bulan Rp 240.000,00 Luar P. Jawa @ Rp 22.000,00 langganan 12 bulan Rp 264.000,00 (belum termasuk ongkos kirim), langganan 1 tahun dibayar di muka.

Pembayaran Melalui: BCA Jl. Jend. Sudirman, Yogyakarta a.n. Sindhunata No. 037.0285.110 atau BNI 46 Cab. Yogyakarta a.n. Bpk Sindhunata No. 1952000512

RUANG DOA

42 Mengikuti Gerakan Roh

Amanda, OSU

BELAJAR TEOLOGI

47 Gereja sebagai "Kesadaran Kontra"

(*Contra-Consciousness*)
Antonius Bagus Prasetya A.N., SJ

SENI DAN RELIGIOTAS

52 Rasa Spiritual Jazz

Agustinus Daryanto, SJ

REMAH REMAH

57 Jangan Ada yang Lapar di Rumah Kita!

M. Adeline Albine Sitepu, FSE

59 Indeks 2020

Redaksi menerima naskah yang sesuai dengan rubrik yang tersedia. Panjang karangan maksimal 11.000 karakter (3-4 hlm. A4 spasi 1). Kirim ke rohanimajalah@gmail.com dengan disertai nama lengkap, alamat, dan nomor rekening. Redaksi berhak menyunting semua naskah yang masuk ke meja redaksi. Tema untuk edisi Januari 2021 adalah "Romo Bernhard Kieser" dan Februari 2021 adalah "Religius dan Hobi". Tenggat waktu pengiriman naskah adalah tanggal 5, satu bulan sebelum edisi tersebut diterbitkan.

Hospitable Language di Indonesia Timur

Gereja menyetujui dan bahkan mendukung Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) PBB yang berlangsung pada 10 Desember 1948. Bagi Gereja, HAM merupakan hak-hak yang secara unik melekat pada diri setiap manusia dan diberikan oleh Sang Pencipta. Oleh sebab itu, menurut Gereja, penghormatan atas HAM menjadi syarat bagi kedamaian (*shalom*). Oleh karena itu, Gereja sepanjang sejarah keberadaannya tidak henti-hentinyaewartakan penghargaan atas martabat manusia untuk menciptakan damai di bumi.

MATEUS MALI, CSSR | Dosen Fakultas Teologi Wedabhakti, Yogyakarta

DASAR pemikiran Gereja berangkat dari penafsirannya atas kisah Inkarnasi Yesus Kristus sebagaimana dikisahkan dalam Luk. 2:1-20. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, para malaikat menyanyikan madah sukacita, damai di bumi bagi orang yang berkenan kepada-Nya. Karena itu pula, setiap tanggal 1 Januari, Paus tidak merayakan “Hari Raya Santa Perawan Maria Bunda Allah” atau “Tahun Baru”, melainkan “Hari Perdamaian Dunia” dengan maksud supaya setiap makhluk sadar bahwa HAM perlu terus-menerus diingat, dihormati, dan dipromosikan oleh setiap orang yang berkehendak

baik. Biasanya pada hari itu, Paus memberikan berkat “*Urbi et Orbi*” sembari mengangkat isu-isu global mengenai pelanggaran HAM. Dengan kata lain, Paus menyadari bahwa pelanggaran HAM masih masif terjadi di dunia sekarang ini.

Pewartaan Gereja tentang HAM

HAM merupakan salah satu isu penting dalam pewartaan Ajaran Sosial Gereja. Paus Yohanes XXIII, lewat Ensiklik *Pacem in Terris*, telah memerinci beberapa hal yang masuk dalam kategori HAM. Hak hidup merupakan hak dasar (PT 11). Dari situ mengalir hak-hak yang lain,

seperti hak untuk mendapatkan makanan, pakaian, tempat tinggal, kesehatan, pelayanan sosial (PT 11), nama baik (PT 12), pendidikan (PT 13), agama (PT 14), pilihan hidup hendak berkeluarga atau tidak (PT 15-16), pendidikan anak (PT 17), pekerjaan (PT 18-20), kepemilikan harta (PT 21-22), kegiatan berkumpul dan berserikat (PT 23-24), beremigrasi atau tinggal di suatu tempat (PT 25-26), dan jaminan mendapat perlindungan hukum (PT 27).

Inti dari seluruh HAM menurut Paus Benediktus XVI ketika berbicara mengenai Ajaran Sosial Gereja pada 4 Mei 2009 adalah "hak hidup dan kebebasan". Dari sudut pandang moral, HAM bersifat *universal* (menyangkut seluruh umat manusia), *inalienable* (tidak terkecuali), dan *inviolable* (tidak memuat kekerasan). Ketiga sifat moral HAM tersebut harus berlaku bagi semua orang supaya tidak terjadi pelanggaran hak-hak atas dasar suku, ras, warna kulit, *gender*, dan agama tertentu.

Gereja Indonesia tidak luput dari perjuangannya untuk mewartakan HAM. Sejak awal, Gereja Indonesia hadir dan senantiasa mendorong umatnya untuk berjuang melawan aneka bentuk penjajahan yang bertentangan dengan HAM. Ketika Soekarno berada di Ende, para Pater SVD memberikan bacaan Ensiklik *Quadragesimo Anno* kepadanya. Dari sanalah lahir gagasan mengenai keadilan sosial sebagaimana muncul dalam Sila ke-5 Pancasila. Secara konkret, Gereja Indonesia berupaya

untuk membela HAM dengan mendirikan komisi *Justice and Peace* di hampir seluruh keuskupan supaya dapat menjadi "*voice of the voiceless*" dari suku-suku asli yang tertindas, kaum perempuan, korban-korban penembakan, dan lain sebagainya.

Ada banyak imam dan religius yang berani berjuang demi membela HAM, khususnya di Indonesia Timur meskipun tindakan mereka sangat membahayakan jiwa dan raga. Beberapa di antara mereka kadang mendapatkan ancaman, tekanan, dan teror dari berbagai pihak. Pernah ada seorang penggiat HAM yang diteror untuk dibunuh sampai-sampai "segala dosa dan kesalahannya" dibebankan di media daring.

Belakangan ini, keuskupan-keuskupan di Indonesia Timur sangat disibukkan dengan berbagai persoalan HAM yang menimpa Indonesia Timur. Keuskupan-keuskupan di Nusa Tenggara Timur, misalnya, menghadapi persoalan *human trafficking*, oknum aparat keamanan yang "main tembak saja", perjuangan penduduk setempat untuk mempertahankan tanah yang diserobot dan dipakai untuk perkebunan atau tambang tertentu, kaum-kaum perempuan yang terbelenggu oleh adat-istiadat seperti "kawin tangkap", kaum-kaum perempuan menjanda karena ditinggal pergi merantau oleh suaminya dan juga ditinggal kawin lagi di tempat barunya, dan masih banyak persoalan lainnya.

Sementara itu, keuskupan-

keuskupan di Papua menghadapi persoalan konflik antara pendatang dan suku asli Papua, tuduhan OPM atau GPK terhadap orang Papua, hutan-hutan yang banyak berubah menjadi kebun kelapa sawit, tanahnya yang dipakai untuk pertambangan tertentu, dan lain-lain. Selain itu, keuskupan-keuskupan di Sulawesi dan Ambon relatif agak tenang soal HAM karena mempunyai beban sejarah “konflik berdarah” di Poso dan Ambon beberapa waktu lalu sehingga isu HAM di sana menjadi sangat sensitif dan dapat memancing konflik.

Lemahnya *Hospitable Language*

Karena keterbatasan ruang dalam Majalah *Rohani* ini, saya hanya mengangkat satu refleksi moral saja dari beberapa persoalan HAM yang terjadi di Indonesia Timur, yakni persoalan lemahnya bahasa ramah (*hospitable language*). Bahasa ramah adalah istilah yang dipakai Paul Ricœur untuk menyatakan pandangannya bahwa dalam berkomunikasi seseorang semestinya menggunakan bahasa yang dapat saling “menemukan” (menerima orang lain sebagai tamunya) antara pihak pembicara dan pendengar.

Selain itu, bahasa ramah adalah juga bahasa yang memungkinkan seseorang untuk berdialog secara terbuka, saling menerima satu sama lain, dan saling menghargai. Bahasa semacam itu akan membuat orang tidak jatuh terperosok ke dalam “etnosentrisme lingustik”

dan hegemoni kultural sehingga tidak terjadi dikotomi antara *insiders* (orang asli) dan *outsiders* (pendatang) sembari tetap menghargai kekayaan masing-masing (pembicara dan pendengar).

Ciri-ciri yang ada dalam diri kami, orang-orang Indonesia Timur, pada umumnya adalah tegas, *omong* apa adanya (*to the point*), berwajah serius, berkulit hitam, dan berambut keriting. Dalam pergaulan sehari-hari, ada banyak bahasa yang tidak ramah. Bahasa kita pada umumnya bersifat *alienable* dan *violable*. Contohnya, “Kulit putih itu cantik” (berarti kulit hitam itu tidak cantik?), “Wajah *glowing* (bersinar) itu memesonakan” (berarti wajah tegas itu tidak memesonakan?), “Rambut lurus itu indah” (berarti rambut keriting itu tidak indah?).

Lebih dari itu, dalam tuturan sehari-hari, istilah “penduduk asli” bernuansa bodoh atau malas, sedangkan pendatang lebih pandai dan rajin. Penduduk asli dikonstruksikan seolah-olah sebagai musuh aparat keamanan karena mereka dianggap sebagai pengacau keamanan. Sementara itu, kaum perempuan harus diam dan tidak boleh bersuara, karena dianggap tabu. Masih banyak lagi contoh lain yang bisa diangkat.

Terhadap fenomena tersebut, barangkali kita dapat berargumentasi secara filosofis sebagai berikut: “Yang dikatakan itulah yang dikatakan. Janganlah ditafsirkan macam-macam.” Kita lupa bahwa bahasa membawa dalam dirinya suatu penafsiran. Apalagi dalam sebuah

kejadian pelanggaran HAM *post factum*, bahasa kebenaran versi aparat keamanan atau pendarang bersifat performatik atau berbasis paham ataupun ideologi yang hampir selalu benar serta dominan. Bahasa penduduk asli selalu kalah. Secara otomatis, orang-orang Indonesia Timur yang cenderung omong apa adanya akan curiga bahwa di balik bahasa, terdapat rahasia yang disembunyikan. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila orang-orang Papua berkata, "Kekayaan ibu (bumi) saya kau ambil, tetapi orangnya kau bunuh."

Seandainya bahasa dimengerti secara luas sebagai ungkapan diri seseorang, bahasa ramah akan memperlihatkan jejak pengalaman, alur pikiran dan nalar, serta harapan dari yang sedang berdialog. Dengan demikian, *trust* (kepercayaan) menjadi sangat penting. Bahasa akan menunjukkan adab, sementara lidah orang yang tepat bahasa dapat menjelma menjadi kekuatan persuasif yang menggugah, memengaruhi, dan membangun persaudaraan. Orang Indonesia Timur lebih suka dengan warna bahasa macam itu. Mereka akan membangun dialog ketika percaya bahwa "engkau" adalah saudaraku yang tidak akan melukai, melecehkan, atau menghina. "Engkau" sudah mereka anggap sebagai saudara, mereka akan berjuang untuk membelanya.

Meskipun demikian, dalam hidup sehari-hari, yang justru

sering terjadi adalah manipulasi persahabatan. Seseorang bisa tega "menjual" saudara-saudaranya sendiri untuk menjadi TKW dengan janji-janji palsu akan kemakmuran dan kesejahteraan. Mereka dijadikan korban oleh mafia *human trafficking*. Alih-alih kemakmuran, justru penderitaanlah yang didapat. Ada banyak peti jenazah TKW yang pada akhirnya dikirim balik ke NTT. Kita semua tahu bahwa *human trafficking* merupakan bentuk perbudakan modern.

Bahasa memang berperan sebagai alat komunikasi. Akan tetapi, dalam berkomunikasi, bahasa itu mengabadikan semua aspek peradaban, baik dari pihak pembicara maupun pendengar. Bahasa ramah juga berada dalam komunikasi semacam itu. Horizon bahasa selalu ikut bermain. Orang-orang Indonesia Timur mengungkapkan seluruh kearifan lokal mereka lewat pantun, cerita, ukiran, ataupun lagu. Oleh karena itu, bahasa ramah dalam bertutur sapa pasti selalu memuat makna.

Di Indonesia Timur, hampir selalu ada konflik atau perang antarsuku, antarklan, antarkeluarga, ataupun antarsaudara. Di saat yang sama, mereka mempunyai kearifan tersendiri untuk menyelesaikan setiap persoalan atau konflik. Mereka akan duduk bersama dan omong *bae-bae* (secara baik) untuk menyelesaikan persoalan mereka. Akan tetapi, sering kali saat terjadi konflik, oknum aparat keamanan "main tembak saja". Celakanya,

yang menjadi korban dari tindakan “main tembak saja” ini adalah orang-orang lokal. Mengapa *sih* tidak ada pendekatan yang berbahasa ramah lewat kearifan lokal mereka? “Main tembak saja” bukanlah solusi yang berdasarkan kearifan. Darah yang tercecer akibat tembakan-tembakan itu akan mengucurkan darah-darah berikutnya. Bagi orang-orang di sana, keadilan berarti, “Saya mati hari ini, besok engkau harus mati juga. Saya akan balas.”

Memang kelemahan kami, orang-orang Indonesia Timur, tampak dalam bahasa yang sering kali bersifat taksa yang mana orang fokus pada ide atau pribadi pembicara saja sehingga tidak melihat keseluruhan konteksnya. Orang akan membenarkan atau menolak sesudah melihat pembicaraannya. Apa yang dikatakan pemimpin akan diikuti dengan setia. “Kalau Bapak atau Om omong, kau (apalagi kalau perempuan) harus diam dan harus taat.” Bahasa semacam itu akan memasung orang pada kesetiaan yang buta, melukai, dan menyakiti batin.

Pernah suatu kali ketika hendak memberkati jenazah seorang bapak, istri dan anak-anaknya menginginkan agar jenazah itu dimakamkan di Yogyakarta. Saat itu, seorang bapak tampil dan dengan lantang berkata, “Diam kau, perempuan. Saya yang beri kau *belis* (mas kawin). Jenazah harus dibawa ke kampung.” Ketika seorang pemimpin sudah bersabda, kami semua harus taat dan mengikuti keinginannya.

Dalam gambaran-gambaran situasi di atas, kita perlu berefleksi, “Apa yang dibutuhkan dalam realitas seperti ini?” Jawaban singkat menurut pandangan saya adalah kita membutuhkan sebuah *genuine dialogue*. Dialog yang jujur adalah percakapan yang memuat *sharing* pengalaman hidup, saling mendengarkan, saling menghargai, dan memuat tindak berbahasa yang merangkul satu sama lain.

Paul Grice menyebutnya dalam empat konsep, yakni *truthfulness*, *informativeness*, *relevance*, dan *style* (saya mengartikannya sebagai adab). Bahasa ramah dalam tutur sehari-hari harus merangkul keempat hal itu. Keadilan dan kesaksian hidup yang nyata dari penduduk asli harus didengarkan dan ditegakkan agar nilai-nilai HAM dapat berdiri tegak.

Sebagai penutup, saya hendak mengutip seorang bijak yang berkata, “Memang lidah tak bertulang,” untuk menunjukkan bahasa yang sering kali bersifat retorik, terselip rahasia, dan berbeda dengan perilaku nyata. Mengapa lidah itu tidak menghasilkan tutur-tutur yang menyejukkan dan *hospitable*? Pelanggaran HAM hanya bisa berakhir kalau setiap orang menggunakan *hospitable language*. ♦